

Pengaruh Kualitas Good Governance terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Negara-Negara ASEAN

Candela d'Eva Putro¹, Khomsiyah^{2*}

Universitas Trisakti, Indonesia

candela.putro@gmail.com¹, khomsiyah@trisakti.ac.id^{2*}

Submitted: 17th July 2024 | **Edited:** 08st Sep 2024 | **Issued:** 01st Dec 2024

Cited on: Putro, C. D., & Khomsiyah, K. (2024). Pengaruh Kualitas Good Governance Terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Negara-Negara ASEAN. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 11(2), 428-442.

Abstract

The aim of this research is to know the effect of the quality of good governance on the Corruption Perception Index in ASEAN countries. This research is quantitative research that uses secondary data with a time series of 2012-2022. It focuses on the six variables of good governance which are Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, and Control of Corruption, with the Corruption Perception Index of nine ASEAN countries. All data of the Corruption Perception Index are taken from Transparency International's website, meanwhile all data for Worldwide Governance Indicators are taken from The World Bank's website. The results show that Regulatory Quality and Control of Corruption scores have a positive effect on the ASEAN Corruption Perception Index score. Meanwhile, Government Effectiveness, Rule of Law and Control of Corruption ranks have a negative effect on the ASEAN Corruption Perception Index rank.

Keywords: ASEAN; Good Governance; Corruption Perception Index

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas good governance terhadap Indeks Persepsi Korupsi di negara-negara ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang menggunakan data sekunder dengan time series tahun 2012-2022. Penelitian ini melihat pengaruh pada enam variabel good governance yaitu Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, dan Control of Corruption, dengan indeks persepsi korupsi sembilan negara ASEAN. Semua data diambil dari laporan indeks persepsi korupsi pada situs Transparency International dan laporan Worldwide Governance Indicators pada situs The World Bank. Hasil akhir dari penelitian menunjukkan bahwa skor Regulatory Quality dan Control of Corruption berpengaruh positif terhadap skor indeks persepsi korupsi ASEAN. Sementara itu, rank Government Effectiveness, Rule of Law dan Control of Corruption berpengaruh negatif terhadap rank indeks persepsi korupsi ASEAN.

Kata Kunci: ASEAN; Good Governance; Indeks Persepsi Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi masih merupakan satu permasalahan besar pada banyak negara di berbagai belahan dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Korupsi yang lekat dengan masalah penyalahgunaan kekuasaan merupakan masalah universal yang susah untuk diatasi apalagi dituntaskan. Ada berbagai alasan mengenai mengapa seseorang atau suatu pemerintahan melakukan tindak pidana korupsi tersebut, namun pada umumnya disebabkan oleh adanya konflik kepentingan (Khomsiyah & Lukviarman, 2011). Dengan adanya konflik tersebut perilaku korupsi kemudian berlanjut dengan masalah lainnya untuk mencapai tujuan akhir yang ingin dicapai. Perbuatan tersebut tidak hanya berpengaruh buruk terhadap karir tokoh penting di masyarakat, tetapi juga terhadap suatu perusahaan, atau organisasi, negara, dan penduduknya. Dengan terjadinya korupsi yang berskala besar, maka rakyat di negara terkait dapat mengalami masalah kesenjangan ekonomi, kerusakan sosial, dan membuat tingkat biaya ekonomi tinggi sehingga negara tidak dapat bergerak maju secara efisien.

Nawatmi (2014) menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi di semua negara tanpa melihat dari segi tingkatan sosial dan pembangunan ekonominya. Saat ini ada tiga macam korupsi, yaitu korupsi dalam kehidupan sehari-hari, korupsi dalam bisnis, dan korupsi dalam kekuasaan yang lebih tinggi (Ibodullaevich & Kholmomin kizi, 2021). Korupsi dalam kehidupan sehari-hari terjadi antara rakyat biasa dengan pejabat, dimana seseorang bisa mendapatkan hadiah dan pejabat bisa mendapatkan pelayanan bagi dirinya dan keluarganya. Korupsi dalam bisnis terjadi ketika suatu pemerintahan berinteraksi dengan satu perusahaan. Korupsi dalam kekuasaan yang lebih tinggi mencakup para pemimpin bidang politik serta Mahkamah Agung dalam sistem demokrasi suatu negara. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan dapat membuat kebijakan yang menguntungkan mereka dan merugikan kepentingan rakyat banyak.

Saat ini salah satu kasus korupsi di Indonesia yang sedang diselidiki oleh pihak berwenang adalah korupsi yang terjadi pada tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk pada tahun 2015-2022. Kasus tersebut disebut telah menimbulkan kerugian lingkungan sebesar 271 triliun. Ada 16 orang yang tersangka, termasuk Harvey Moeis yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi. Kasus ini masih terus dikembangkan sampai saat ini. Selain itu, kasus besar lainnya yang juga menarik perhatian terjadi di Filipina pada bulan Februari 2024. Tiga mantan pejabat *National Agribusiness Corporation* (Nabcor) dijatuhi hukuman penjara setelah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang pengadaan alat pertanian yang menimbulkan kerugian negara sebesar 99.9 juta peso. Ketiga mantan pejabat tersebut dijatuhi hukuman penjara selama enam hingga sembilan tahun untuk mempertanggungjawabkan kesalahan mereka.

Korupsi memiliki dampak yang besar bagi suatu negara di berbagai sektor, Indonesia mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada tahun 2003. Tujuan utama dibentuknya KPK agar dapat memberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Tidak hanya Indonesia, namun semua negara ASEAN memiliki badan pemberantasan korupsi; Brunei Darussalam dengan *Anti-Corruption Bureau*, Filipina dengan *Office of the Ombudsman*, Kamboja dengan

Anti-Corruption Unit, Laos dengan *State Inspection and Anti-Corruption Authority*, Malaysia dengan *Malaysian Anti-Corruption Commission*, Myanmar dengan *Anti-Corruption Commission*, Singapura dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau*, Thailand dengan *National Anti-Corruption Commission*, dan terakhir Vietnam dengan *The Government Inspectorate*. Sepuluh negara ASEAN merupakan anggota dari *The Southeast Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC)*, yaitu badan yang terbentuk pada 15 Desember 2004 ketika *Memorandum of Understanding (MOU) on Cooperation for Preventing and Combating Corruption* ditandatangani oleh badan anti korupsi Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura.

Salah satu cara mengetahui tingkat korupsi pada suatu negara adalah dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index [CPI]*). Indeks Persepsi Korupsi dikeluarkan oleh *Transparency International*, sebuah organisasi dengan tujuan utama pembentukannya yaitu untuk memberantas persoalan korupsi. Tidak hanya itu, tujuan lainnya yang ingin disampaikan *Transparency International* adalah untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, serta integritas pada semua sektor lembaga. Indeks Persepsi Korupsi diukur dengan skala 0 (nol) hingga 100 (seratus), dimana jika suatu negara mendapat nilai 0 maka negara tersebut dianggap sangat korup, dan jika nilai mencapai angka 100 maka negara tersebut dianggap sangat bersih. Kalkulasi skor dilakukan dengan menggabungkan setidaknya tiga sumber data yang diambil dari 13 survei dan penilaian korupsi yang berbeda. Sumber data dikumpulkan oleh lembaga-lembaga yang dikenal memiliki reputasi yang baik, seperti *World Bank* dan *World Economic Forum*. Ada 180 negara yang diperiksa oleh *Transparency International*, dimana diantaranya terdapat 9 dari 10 negara ASEAN.

Selain permasalahan korupsi, topik *good governance* juga memicu banyak perhatian dari mancanegara. *Good governance* dianggap menjadi kunci yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi modern (Kraipornsak, 2018). Menurut *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, *good governance* sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil keputusan politik suatu negara, yang diperlukan untuk mencapai tujuan perkembangan negara yang lebih baik. Selain itu, *good governance* juga digunakan sebagai indikator tingkat kemajuan suatu negara. Sayangnya, masalah ini masih belum terselesaikan di banyak negara, termasuk di negara-negara ASEAN.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) mendeskripsikan *governance* sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan bagaimana dilaksanakannya (atau tidak dilaksanakannya) keputusan tersebut. Sementara itu, Fukuyama (2013) memberikan pengertian *governance* sebagai kemampuan negara untuk membuat dan menegakkan peraturan, dan memberikan pelayanan, tanpa melihat apabila pemerintahan tersebut demokratis atau tidak. *Governance* memiliki tiga pilar yang berkaitan satu sama lain yaitu *economic*, *political*, dan *administrative governance*. *Economic governance* mencakup proses pembuatan keputusan dan bagaimana memfasilitasi aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara. *Political governance* berkaitan dengan proses memformulasikan kebijakan.

Terakhir, *administrative governance* berhubungan dengan sistem implementasi kebijakan (Rasul, 2009).

World Bank mengeluarkan *World Governance Indicators (WGI)* yang merupakan salah satu indikator *good governance* yang banyak digunakan secara global (Iskandar *et al.*, 2020). Diciptakan pada tahun 1999 oleh Daniel Kaufmann dan Aart Kraay, ada enam indikator yang digunakan oleh WGI; *Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, dan Control of Corruption.*

Penelitian yang dilakukan oleh Absadykov (2020) mengenai hubungan *Economic Growth* dengan tiga indikator WGI (*political stability, regulatory quality, dan control of corruption*) di Kazakhstan menunjukkan bahwa kualitas *good governance* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut.

Sementara itu, Purnama (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh indeks persepsi korupsi, inflasi, dan nilai tukar terhadap investasi langsung di ASEAN-5 (Filipina, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa investasi asing langsung di ASEAN-5 dipengaruhi oleh IPK, inflasi, dan nilai tukar. Selain itu IPK dan nilai tukar memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Terakhir, studi yang dilakukan Khomsiyah dan Lukviarman (2011) tentang cara memperkuat jati diri bangsa melalui penegakan *good governance* di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi merupakan penghalang implementasi *governance*. Tidak hanya itu, hasil *governance* Indonesia bergantung pada tanggung jawab elemen bangsa Indonesia, dan salah satu cara penguatannya adalah dengan reformasi birokrasi.

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganalisis hubungan antara kualitas *good governance* dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di negara-negara ASEAN. Penulis ingin mengetahui bila kualitas *good governance* memiliki signifikansi terhadap hasil IPK. Unsur kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang ingin dilakukan adalah penulis akan menguji nilai *rank* terhadap masing-masing IPK dan WGI. Pada penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang menguji pengaruh *ranking* terhadap indeks persepsi korupsi negara-negara.

LANDASAN TEORI

Principal Agent Theory

Teori *Principal Agent* merupakan kerangka teori yang menganalisis korupsi dalam suatu *public governance*. Teori menjelaskan hubungan antara para *principal* dengan agen. *Principal* dapat diartikan sebagai rakyat negara yang memberikan delegasi kepada agen yaitu pejabat publik negara (Koeswayo *et al.*, 2024). Pencetus teori *principal agent* adalah Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang ingin mempertegas permasalahan kesenjangan informasi yang didapatkan oleh para agen dengan *principal*. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya korupsi sebab agen memprioritaskan keuntungan pribadi.

Institutional Theory

Teori institusional mempertimbangkan bagaimana peraturan, norma, dan rutinitas ditetapkan sebagai pedoman berwenang, dan mempertimbangkan bagaimana elemen ini bisa diciptakan, diadopsi dan diadaptasi seiring berjalannya waktu. Teori ini digunakan untuk memahami pengaruhnya dalam struktur sebuah organisasi (Rankin *et al.*, 2018).

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kualitas *good governance* terhadap indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN. Unit analisis dalam penelitian ini adalah level negara. Selain itu, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan *time series* 2012-2022. Data sekunder penelitian ini diambil dari laporan indeks persepsi korupsi pada situs *Transparency International* (www.transparency.org) dan laporan *Worldwide Governance Indicators* pada situs *The World Bank* (www.worldbank.org).

Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini merupakan *purposive sampling*. Dari 10 negara ASEAN, 9 negara memenuhi kriteria pemilihan sampel. Oleh karena itu penelitian akan menggunakan 99 data observasi (skor dan *rank*) dari 9 negara ASEAN pada rentang waktu tahun 2012-2022. Selain itu, penelitian ini memakai data kuantitatif dan akan diolah dengan menggunakan perangkat SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 26,0.

Menurut Suriani *et al.* (2023), populasi dapat diartikan sebagai seluruh subjek atau objek penelitian yang mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat menjadi fokus penelitian dan ambil kesimpulan. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah negara-negara ASEAN yang terdaftar pada halaman situs www.asean.org. Sementara itu, sampel hanya sebagian dari populasi yang sudah terpilih. Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih adalah 9 negara ASEAN yang telah memenuhi kriteria, yaitu negara yang mempunyai data indeks persepsi korupsi dan *Worldwide Governance Indicators* secara konsisten pada periode tahun 2012-2022.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menjabarkan hasil perhitungan nilai minimum, maksimum, *mean* (rata-rata), dan standar deviasi dari masing-masing variabel pada penelitian, yaitu Indeks Persepsi Korupsi (IPK), *Voice and Accountability* (VA), *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* (PV), *Government Effectiveness* (GE), *Regulatory Quality* (RQ), *Rule of Law* (RL), dan *Control of Corruption* (CC).

Tabel 1. Statistik Deskriptif Skor

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPK_Skor	99	15	87	38,82	18,232
VA_Skor	99	-1,82	0,18	-0,7221	0,67412
PV_Skor	99	-2,21	1,60	-0,1722	0,82603
GE_Skor	99	-1,68	2,28	0,1093	0,97265
RQ_Skor	99	-1,83	2,25	0,0006	0,92842
RL_Skor	99	-1,53	1,84	-0,2106	0,86769

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CC_Skor	99	-1,36	2,14	-0,2960	0,93791
Valid N (likewise)	99				

Sumber: data sekunder diolah dengan SPSS 26.0, 2024

Variabel dependen (Y) IPK memiliki nilai minimum 15 yang diperoleh oleh negara Myanmar pada tahun 2012 dan nilai maksimum 87 yang diraih oleh Singapura pada tahun 2012. Rata-rata yang diperoleh dari IPK adalah 38,82. Nilai standar deviasi IPK negara ASEAN pada periode tahun 2012-2022 adalah 18,232. Variabel independen X1, yaitu VA memiliki nilai minimum -1,82 yang dimiliki oleh negara Laos pada tahun 2019 dan nilai maksimum 0,18 dari negara Indonesia pada tahun 2015. Nilai rata-rata dari VA adalah -0,7221, yang masih dianggap skor *governance* rendah, dengan standar deviasi 0,67412. Variabel independen X2, PV mempunyai nilai minimum sebesar -2,21 yang diraih oleh Myanmar pada tahun 2022 dan nilai maksimum 1,60 yang dimiliki oleh negara Singapura pada tahun 2017. Nilai rata-rata yang diperoleh PV - 0,1722, dengan nilai standar deviasi 0,82603. Variabel independen X3, GE memiliki nilai minimum -1,68 yang diperoleh Myanmar pada tahun 2022 dan nilai maksimum 2,28 yang diraih oleh Singapura pada tahun 2020. Nilai rata-rata dari GE yaitu 0,1093, dengan standar deviasi sebesar 0,97265. Variabel independen X4, RQ memiliki nilai minimum -1,83 yang diperoleh Myanmar pada tahun 2012. dan nilai maksimum 2,25 yang diperoleh Singapura pada tahun 2015. Nilai rata-rata RQ adalah 0,0006, yang menunjukkan bahwa indikator sudah mulai diimplementasi namun belum ketat di negara-negara ASEAN, dengan nilai standar deviasi 0,92842. Variabel independen X5, RL memiliki nilai minimum -1,53 yang diperoleh Myanmar pada tahun 2022 dan nilai maksimum 1,84 yang diperoleh Singapura pada tahun 2019. Nilai rata-rata RL adalah - 0,2106, yang menunjukkan bahwa indikator RL masih perlu diperketat di negara-negara ASEAN. Nilai standar deviasi pada RL tahun 2012-2022 sebesar 0,86769. Variabel independen X6, CC memiliki nilai minimum -1,36 yang diperoleh Kamboja pada tahun 2018 dan nilai maksimum 2,14 yang diperoleh Singapura pada tahun 2021. Nilai rata-rata CC adalah -0,2960, yang menunjukkan bahwa pengendalian korupsi di negara ASEAN masih belum ketat. Nilai standar deviasi CC pada periode tahun 2012-2022 adalah 0,93791.

Sementara itu, statistik deskriptif untuk *rank* negara-negara ASEAN adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif Rank

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPK_Rank	99	3	172	100,73	45,375
VA_Rank	99	1,93	53,69	28,0740	17,18130
PV_Rank	99	2,83	99,05	42,4631	26,17951
GE_Rank	99	3,79	100	52,6432	26,47224
RQ_Rank	99	2,40	100	48,8733	25,59165
RL_Rank	99	5,70	99,10	42,9990	25,83803
CC_Rank	99	8,60	99	39,8172	25,28416
Valid N (likewise)	99				

Sumber: data sekunder diolah dengan SPSS 26.0, 2024

Variabel dependen (Y) IPK memiliki *rank* minimum 3 yang diperoleh oleh negara Singapura pada tahun 2018 dan *rank* maksimum dari IPK adalah 172 yang diraih oleh Myanmar pada tahun 2012. Rata-rata *rank* yang diperoleh dari

IPK adalah 100,73, yang menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN secara keseluruhan memiliki *ranking* IPK yang menengah menuju rendah. Nilai standar deviasi IPK negara ASEAN pada periode tahun 2012-2022 adalah 45,375. Variabel independen X1, yaitu VA memiliki *rank* minimum 1,93 yang dimiliki oleh Myanmar pada tahun 2022 dan *rank* maksimum 53,69 dari Indonesia pada tahun 2015. Selanjutnya, rata-rata dari *rank* VA adalah 28,0740, yang menunjukkan kalau *rank* indikator VA di ASEAN secara keseluruhan masih sangat rendah, dengan standar deviasi 17,18130. Variabel independen X2, PV mempunyai *rank* minimum sebesar 2,83 yang diraih oleh Myanmar pada tahun 2022 dan *rank* maksimum 99,05 yang dimiliki oleh Singapura pada tahun 2017. Nilai rata-rata *rank* yang diperoleh PV 42,4631, yang menunjukkan bahwa *rank* PV di negara-negara ASEAN berada di tengah bawah dalam 11 tahun terakhir, dengan nilai standar deviasi 26,17951. Variabel independen X3, GE memiliki *rank* minimum 3,79 yang diperoleh Myanmar pada tahun 2013 dan *rank* maksimum 100 yang diraih oleh Singapura selama enam tahun terakhir, dari tahun 2014 hingga 2020. Nilai rata-rata *rank* GE adalah 52,6432, yang menunjukkan bahwa indikator GE memiliki nilai *rank* tertinggi dibanding indikator-indikator lainnya, dengan standar deviasi sebesar 26,47224. Variabel independen X4, RQ memiliki *rank* minimum 2,40 yang diperoleh Myanmar pada tahun 2012 dan *rank* maksimum 100 yang diperoleh Singapura pada tahun 2012-2016 dan 2019-2022. Rata-rata dari *rank* RQ adalah 48,8733, yang menunjukkan bahwa indikator sudah mulai diimplementasi namun belum ketat di negara-negara ASEAN, dengan nilai standar deviasi 25,59165. Variabel independen X5, RL memiliki *rank* minimum 5,70 yang diperoleh Myanmar pada tahun 2021 serta 2022 dan *rank* maksimum 99,10 yang diperoleh negara Singapura pada tahun 2022. Nilai rata-rata dari *rank* RL adalah 42,9990, yang menunjukkan bahwa indikator RL masih perlu diperketat di negara-negara ASEAN karena masih mempunyai *ranking* yang menengah. Nilai standar deviasi pada RL tahun 2012-2022 sebesar 25,83803. Variabel independen X6, CC memiliki *rank* minimum 8,60 yang diperoleh Kamboja pada tahun 2018 dan *rank* maksimum 99 yang diperoleh Singapura pada tahun 2019 dan 2020. Nilai rata-rata *rank* CC adalah 39,8172, yang menunjukkan bahwa pengendalian korupsi di negara ASEAN masih belum ketat karena masih dibawah 40%. Nilai standar deviasi *rank* CC pada periode tahun 2012-2022 adalah 25,28416.

Uji Asumsi Klasik

Terdapat 3 tahapan uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

Uji Normalitas

Dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, hasil bisa dikatakan normal bila tingkat signifikansi $> 0,05$ atau lebih besar dari 0,05. Sementara itu, jika hasil tingkat signifikansi $< 0,05$ atau lebih kecil dari 0,05 maka tidak normal.

Tabel 3. Uji Normalitas

	Signifikansi	Keterangan
Skor	0,119	Normal
Rank	0,06	Normal

Sumber: data sekunder diolah dengan SPSS 26.0, 2024

Dari hasil yang diperoleh pada Tabel 3, nilai skor dan rank menunjukkan bahwa signifikansi keduanya adalah lebih besar dari 0,05. Ini mengartikan bahwa keduanya terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Apabila *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan *Tolerance* > 0,01, maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas untuk nilai skor:

Tabel 4. Uji Multikolinieritas Skor

	VIF	Tolerance	Keterangan
VA_Skor	3,744	0,267	Tidak terjadi multikolinieritas
PV_Skor	2,885	0,347	Tidak terjadi multikolinieritas
GE_Skor	37,336	0,027	Terjadi multikolinieritas
RQ_Skor	25,305	0,040	Terjadi multikolinieritas
RL_Skor	40,184	0,025	Terjadi multikolinieritas
CC_Skor	14,347	0,070	Terjadi multikolinieritas

a. Dependent Variable: IPK_Skor

Sumber: data sekunder diolah dengan SPSS 26.0, 2024

Dari hasil yang diperoleh pada Tabel 4, variabel *Voice and Accountability* dan *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* tidak terjadi multikolinieritas. Variabel selebihnya yaitu *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption* terjadi multikolinieritas. Sementara itu, hasil uji multikolinieritas untuk nilai rank sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Multikolinieritas Rank

	VIF	Tolerance	Keterangan
VA_Rank	4,727	0,212	Tidak terjadi multikolinieritas
PV_Rank	2,445	0,409	Tidak terjadi multikolinieritas
GE_Rank	20,552	0,049	Terjadi multikolinieritas
RQ_Rank	17,850	0,056	Terjadi multikolinieritas
RL_Rank	30,418	0,033	Terjadi multikolinieritas
CC_Rank	12,436	0,080	Terjadi multikolinieritas

a. Dependent Variable: IPK_Rank

Sumber: data sekunder diolah dengan SPSS 26.0, 2024

Dari hasil yang diperoleh pada Tabel 5, variabel *Voice and Accountability* dan *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* tidak terjadi multikolinieritas. Variabel selebihnya yaitu *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption* terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Dengan uji *Glesjer*, bila nilai signifikansi > 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Sementara itu, jika nilai signifikansi < 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil uji *Glesjer* untuk nilai skor adalah:

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas Skor

	Signifikansi	Keterangan
VA_Skor	0,684	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PV_Skor	0,043	Terjadi heteroskedastisitas
GE_Skor	0,706	Tidak terjadi heteroskedastisitas
RQ_Skor	0,109	Tidak terjadi heteroskedastisitas
RL_Skor	0,642	Tidak terjadi heteroskedastisitas

CC_Skor	0,345	Tidak terjadi heteroskedastisitas
---------	-------	-----------------------------------

a. Dependent Variable: Abs_RES (Skor)

Sumber: data sekunder diolah dengan SPSS 26.0, 2024

Dari hasil yang diperoleh pada Tabel 6, variabel *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* terjadi multikolinieritas. Selain variabel tersebut, semua variabel lainnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sementara itu, hasil uji heteroskedastisitas nilai rank adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas Rank

	Signifikansi	Keterangan
VA_Rank	0,240	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PV_Rank	0,822	Tidak terjadi heteroskedastisitas
GE_Rank	0,169	Tidak terjadi heteroskedastisitas
RQ_Rank	0,484	Tidak terjadi heteroskedastisitas
RL_Rank	0,963	Tidak terjadi heteroskedastisitas
CC_Rank	0,096	Tidak terjadi heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: Abs_RES (Rank)

Sumber: data sekunder diolah dengan SPSS 26.0, 2024

Dari hasil yang diperoleh pada Tabel 7, semua variabel memiliki signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yang mengartikan bahwa semua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu teori pada penelitian.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Squared)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

	Adjusted R Squared
Skor	0,983
Rank	0,960

Sumber: data sekunder diolah dengan SPSS 26.0, 2024

Nilai *adjusted R squared* skor adalah 0,983. Ini menunjukkan kalau 98,3% nilai skor indeks persepsi korupsi negara-negara ASEAN dapat dijelaskan oleh variabel independen VA, PV, GE, RQ, RL, dan CC. Sementara itu, nilai *adjusted R squared rank* adalah 0,960 yang menunjukkan kalau 96% nilai *rank* indeks persepsi korupsi negara-negara ASEAN dapat dijelaskan oleh variabel independen VA, PV, GE, RQ, RL, dan CC.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel dalam sebuah penelitian atau model memiliki pengaruh secara bersama-sama kepada variabel dependen. Bila signifikansi > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sementara itu, jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji simultan pada nilai skor dan *rank* adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Uji Simultan

	Signifikansi	Keterangan
Skor	0,000	Berpengaruh signifikan
Rank	0,000	Berpengaruh signifikan

Sumber: data sekunder diolah dengan SPSS 26.0, 2024

Dari hasil yang diperoleh pada Tabel 9, dapat diketahui bahwa nilai skor dan *rank* berpengaruh signifikan. Ini menunjukkan bahwa nilai skor variabel VA,

PV, GE, RQ, RL, dan CC memiliki pengaruh secara simultan terhadap skor indeks persepsi korupsi. Selain itu, nilai *rank* variabel VA, PV, GE, RQ, RL, dan CC juga memiliki pengaruh secara simultan terhadap *rank* indeks persepsi korupsi.

Pengujian Korelasi

Pengujian korelasi bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel. Pada penelitian ini yang akan dievaluasi adalah hubungan antara masing-masing variabel *Worldwide Governance Indicators* terhadap indeks persepsi korupsi negara ASEAN selama 11 tahun terakhir. Berikut adalah hasil dari pengujian korelasi untuk nilai skor:

Tabel 10. Pengujian Korelasi Pearson Skor

Variabel	IPK	Korelasi		
		Tingkat	Arah	
VA_Skor	<i>Pearson Correlation</i> Sig.(2-tailed)	0,531 0,000	Korelasi sedang Terdapat korelasi	Berbanding lurus
PV_Skor	<i>Pearson Correlation</i> Sig.(2-tailed)	0,651 0,000	Korelasi kuat Terdapat korelasi	Berbanding lurus
GE_Skor	<i>Pearson Correlation</i> Sig.(2-tailed)	0,942 0,000	Korelasi sempurna Terdapat korelasi	Berbanding lurus
RQ_Skor	<i>Pearson Correlation</i> Sig.(2-tailed)	0,948 0,000	Korelasi sempurna Terdapat korelasi	Berbanding lurus
RL_Skor	<i>Pearson Correlation</i> Sig.(2-tailed)	0,963 0,000	Korelasi sempurna Terdapat korelasi	Berbanding lurus
CC_Skor	<i>Pearson Correlation</i> Sig.(2-tailed)	0,988 0,000	Korelasi sempurna Terdapat korelasi	Berbanding lurus

Sumber: data sekunder diolah dengan SPSS 26.0, 2024

Berdasarkan Tabel 10 yang menggunakan pengujian korelasi *Pearson*, semua variabel memiliki korelasi terhadap indeks persepsi korupsi. Variabel yang memiliki korelasi terendah adalah indikator *Voice and Accountability* (VA), yang mempunyai korelasi sedang. Sedangkan variabel *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* (PV) memiliki korelasi yang kuat terhadap IPK negara-negara ASEAN. Sementara variabel *Government Effectiveness* (GE), *Regulatory Quality* (RQ), *Rule of Law* (RL), dan *Control of Corruption* (CC) memiliki korelasi yang sempurna pada IPK, dengan CC yang memiliki nilai tertinggi sebesar 0,988. Selain itu, hasil nilai signifikansi dari semua variabel independen adalah 0,000. Maka dari itu, semua indikator WGI terdapat hubungan dengan IPK.

Sementara itu, hasil dari pengujian korelasi *Pearson* untuk *rank* WGI dan IPK sebagai berikut:

Tabel 11. Pengujian Korelasi Pearson Rank

Variabel	IPK	Korelasi		
		Tingkat	Arah	
VA_Rank	<i>Pearson Correlation</i> Sig.(2-tailed)	-0,603 0,000	Korelasi kuat Terdapat korelasi	Berbanding terbalik
PV_Rank	<i>Pearson Correlation</i> Sig.(2-tailed)	-0,573 0,000	Korelasi sedang Terdapat korelasi	Berbanding terbalik
GE_Rank	<i>Pearson Correlation</i> Sig.(2-tailed)	-0,930 0,000	Korelasi sempurna Terdapat korelasi	Berbanding terbalik
RQ_Rank	<i>Pearson Correlation</i> Sig.(2-tailed)	-0,922 0,000	Korelasi sempurna Terdapat korelasi	Berbanding terbalik

RL_Rank	<i>Pearson Correlation</i>	-0,957	Korelasi sempurna	Berbanding
	Sig.(2-tailed)	0,000	Terdapat korelasi	terbalik
CC_Rank	<i>Pearson Correlation</i>	-0,970	Korelasi sempurna	Berbanding
	Sig.(2-tailed)	0,000	Terdapat korelasi	terbalik

Sumber: data sekunder diolah dengan SPSS 26.0, 2024

Berdasarkan Tabel 11 pengujian *rank* WGI pada IPK negara-negara ASEAN, semua korelasi menghasilkan nilai minus. Ini terjadi sebab nilai *rank* antara semua indikator WGI berbanding terbalik dengan nilai *rank* IPK. Dalam WGI, rank diukur dari 0-100, dimana 0 mengartikan *rank governance* terendah dan 100 menunjukkan *rank* tertinggi. Sementara itu, *rank* IPK diukur dari banyaknya negara yang dilihat indeksinya pada tahun tersebut, pada umumnya 180 negara. *Rank* 1 menunjukkan bahwa negara sangat bersih dari korupsi, dan rank 180 mengartikan bahwa negara sangat korup. Nilai rank yang berbanding balik mengakibatkan hasil korelasi yang minus.

Variabel yang memiliki korelasi terendah adalah *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* (PV), dengan korelasi sedang. Setelah itu variabel dengan korelasi kuat adalah *Voice and Accountability* (VA). Sementara itu, *Government Effectiveness* (GE), *Regulatory Quality* (RQ), *Rule of Law* (RL), dan *Control of Corruption* (CC) memiliki korelasi sempurna terhadap indeks persepsi korupsi. Tidak hanya itu, hasil nilai signifikansi dari semua variabel independen adalah 0,000, yang menunjukkan bahwa semua indikator WGI terdapat hubungan dengan IPK.

Pengujian Regresi Linear Berganda

Pengujian regresi linear berganda mempunyai tujuan untuk melihat hubungan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian regresi linear berganda nilai skor *Worldwide Governance Indicators* terhadap indeks persepsi korupsi:

Tabel 12. Pengujian Regresi Linear Berganda Skor

	Unstandardized Coefficient B	t	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)	Keputusan
(Constant)	42,187	50,080	0,000	0,000	-
VA_Skor	-1,134	-1,640	0,104	0,052	Tolak
PV_Skor	0,464	0,936	0,352	0,176	Tolak
GE_Skor	1,502	0,992	0,324	0,162	Tolak
RQ_Skor	3,789	2,903	0,005	0,0025	Terima
RL_Skor	-0,013	-0,007	0,994	0,497	Tolak
CC_Skor	14,453	14,856	0,000	0,000	Terima

a. Dependent Variable: IPK_Skor

Sumber: data sekunder diolah dengan SPSS 26.0, 2024

Berdasarkan Tabel 12 yang menunjukkan hasil pengujian regresi linear berganda nilai skor, maka model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$IPK = 42,187 - 1,134 VA + 0,464 PV + 1,502 GE + 3,789 RQ - 0,013 RL + 14,453 CC + e$$

Dari persamaan tersebut, maka:

Konstanta sebesar 42,187

Hasil ini menunjukkan bahwa jika variabel *Voice and Accountability* (VA), *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* (PV), *Government Effectiveness* (GE), *Regulatory Quality* (RQ), *Rule of Law* (RL), dan *Control of*

Corruption (CC) bersifat konstan, maka variabel nilai skor indeks persepsi korupsi adalah 42,187.

***Voice and Accountability* berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi**

Hasil menunjukkan nilai koefisien regresi VA sebesar -1,134. Ini berarti jika VA mengalami penurunan satu satuan, dan variabel independen lainnya bersifat konstan, maka akan menurunkan nilai skor IPK sebesar 1,134.

***Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* berpengaruh positif terhadap indeks persepsi korupsi**

Hasil menunjukkan nilai koefisien regresi PV sebesar 0,464. Ini berarti jika PV mengalami kenaikan satu satuan, dan variabel independen lainnya bersifat konstan, maka nilai skor IPK akan naik sebesar 0,464.

***Government Effectiveness* berpengaruh positif terhadap indeks persepsi korupsi**

Hasil menunjukkan nilai koefisien regresi GE sebesar 1,502. Ini berarti jika GE mengalami kenaikan satu satuan, dan variabel independen lainnya bersifat konstan, maka nilai skor IPK akan naik sebesar 1,502.

***Regulatory Quality* berpengaruh positif terhadap indeks persepsi korupsi**

Hasil menunjukkan nilai koefisien regresi RQ sebesar 3,789. Ini berarti jika RQ mengalami kenaikan satu satuan, dan variabel independen lainnya bersifat konstan, maka nilai skor IPK akan naik sebesar 3,789.

***Rule of Law* berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi**

Hasil menunjukkan nilai koefisien regresi RL sebesar -0,013. Ini berarti jika RL mengalami penurunan satu satuan, dan variabel independen lainnya bersifat konstan, maka akan menurunkan nilai skor IPK sebesar 0,013.

***Control of Corruption* berpengaruh positif terhadap indeks persepsi korupsi**

Hasil menunjukkan nilai koefisien regresi CC sebesar 14,453. Ini berarti jika CC mengalami kenaikan satu satuan, dan variabel independen lainnya bersifat konstan, maka nilai skor IPK akan naik sebesar 14,453.

Sementara itu, hasil dari pengujian regresi linear berganda untuk nilai rank adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Pengujian Regresi Linear Berganda Rank

	Unstandardized Coefficient B	t	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)	Keputusan
(Constant)	178,440	70,518	0,000	0,000	-
VA_Rank	-0,176	-1,526	0,130	0,065	Tolak
PV_Rank	-0,028	-0,510	0,611	0,3055	Tolak
GE_Rank	-0,278	-1,776	0,079	0,0395	Terima
RQ_Rank	0,027	0,179	0,858	0,429	Tolak
RL_Rank	-0,380	-1,947	0,055	0,0275	Terima
CC_Rank	-1,054	-8,273	0,000	0,000	Terima

a. Dependent Variable: IPK_Rank

Sumber: data sekunder diolah dengan SPSS 26.0, 2024

Berdasarkan Tabel 13, yang menunjukkan hasil pengujian regresi linear berganda nilai rank, maka model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$IPK = 178,440 - 0,176 VA - 0,028 PV - 0,278 GE + 0,027 RQ - 0,380 RL - 1,054 CC + e$$

Dari persamaan tersebut, maka:

Konstanta sebesar 178,440

Hasil ini menunjukkan bahwa jika variabel *Voice and Accountability* (VA), *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* (PV), *Government Effectiveness* (GE), *Regulatory Quality* (RQ), *Rule of Law* (RL), dan *Control of Corruption* (CC) bersifat konstan, maka variabel nilai rank indeks persepsi korupsi adalah 178,440.

***Voice and Accountability* berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi**

Hasil menunjukkan nilai koefisien regresi VA sebesar -0,176. Ini berarti jika VA mengalami penurunan satu satuan, dan variabel independen lainnya bersifat konstan, maka akan menurunkan nilai skor IPK sebesar 0,176.

***Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi**

Hasil menunjukkan nilai koefisien regresi PV sebesar -0,028. Ini berarti jika PV mengalami penurunan satu satuan, dan variabel independen lainnya bersifat konstan, maka akan menurunkan nilai skor IPK sebesar 0,028.

***Government Effectiveness* berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi**

Hasil menunjukkan nilai koefisien regresi GE sebesar -0,278. Ini berarti jika GE mengalami penurunan satu satuan, dan variabel independen lainnya bersifat konstan, maka akan menurunkan nilai skor IPK sebesar 0,278.

***Regulatory Quality* berpengaruh positif terhadap indeks persepsi korupsi**

Hasil menunjukkan nilai koefisien regresi RQ sebesar 0,027. Ini berarti jika RQ mengalami kenaikan satu satuan, dan variabel independen lainnya bersifat konstan, maka nilai skor IPK akan naik sebesar 0,027.

***Rule of Law* berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi**

Hasil menunjukkan nilai koefisien regresi RL sebesar -0,380. Ini berarti jika RL mengalami penurunan satu satuan, dan variabel independen lainnya bersifat konstan, maka akan menurunkan nilai skor IPK sebesar 0,380.

***Control of Corruption* berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi**

Hasil menunjukkan nilai koefisien regresi CC sebesar -1,054. Ini berarti jika CC mengalami penurunan satu satuan, dan variabel independen lainnya bersifat konstan, maka akan menurunkan nilai skor IPK sebesar 1,054

KESIMPULAN

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui apabila adanya hubungan antara kualitas good governance terhadap indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Skor *Voice and Accountability* (VA) tidak berpengaruh terhadap skor indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN;
2. *Rank Voice and Accountability* (VA) tidak berpengaruh terhadap *rank* indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN;
3. Skor *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* (PV) tidak berpengaruh terhadap skor indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN;

4. *Rank Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* (PV) tidak berpengaruh terhadap *rank* indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN;
5. Skor *Government Effectiveness* (GE) tidak berpengaruh terhadap skor indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN;
6. *Rank Government Effectiveness* (GE) berpengaruh negatif terhadap *rank* indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN;
7. Skor *Regulatory Quality* (RQ) berpengaruh positif terhadap skor indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN;
8. *Rank Regulatory Quality* (RQ) tidak berpengaruh terhadap *rank* indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN;
9. Skor *Rule of Law* (RL) tidak berpengaruh terhadap skor indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN;
10. *Rank Rule of Law* (RL) berpengaruh negatif terhadap *rank* indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN;
11. Skor *Control of Corruption* (CC) berpengaruh positif terhadap skor indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN;
12. *Rank Control of Corruption* (CC) berpengaruh negatif terhadap *rank* indeks persepsi korupsi di negara-negara ASEAN;

DAFTAR PUSTAKA

- About good governance*. (n.d.). OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/good-governance/about-good-governance>
- Absadykov, A. (2020). Does good governance matter? Kazakhstan's economic growth and worldwide governance indicators. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.26618/ojip.v10i1.2776>
- Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368. <https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Ibodullaevich, & Kholmomin kizi, U. G. (2021). Types, Forms of Corruption, Causes and Consequences. *Scientific Journal Volume: 1, Issue: 4*, 4–8.
- Iskandar, D., Hendaro, R. M., & Reza, A. (2020). GOOD GOVERNANCE AND NATURAL RESOURCE CURSE; WHICH HYPOTHESIS IS PREVAILING IN ASEAN ECONOMIES? *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(1), 45–54. <https://doi.org/10.14203/jep.28.1.2020.45-54>
- Khomsiyah, & Lukviarman, N. (2011). Memperkuat Jati Diri Bangsa Melalui Penegakan Good Governance di Indonesia. *Menjadi Tuan Di Negeri Sendiri: Problem Dan Prospek Bagi Bangsa Indonesia*.
- Koeswayo, P. S., Handoyo, S., & Abdul Hasyir, D. (2024). Investigating the relationship between public governance and the corruption perception index. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2342513>
- Kraipornsak, P. (2018). GOOD GOVERNANCE AND ECONOMIC GROWTH: AN INVESTIGATION OF THAILAND AND SELECTED ASIAN COUNTRIES. *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 6(1), 93–106. <https://doi.org/10.15604/ejef.2018.06.01.009>
- Nawatmi, S. (2014). KORUPSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA ASIA PASIFIK. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 73–82.

- Purnama, M. C. (2022). Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Investasi Asing Langsung di ASEAN-5. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 2(2), 41–48. <https://doi.org/10.53867/jea.v2i2.50>
- Rankin, M., Ferlauto, K., McGowan, S., & McGowan, P. (2018). *Contemporary issues in accounting*. Wiley.
- Rasul, S. (2009). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *MIMBAR HUKUM*, 21(3), 409–628.
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i1>
- UNESCAP. (n.d.). *What is Good Governance?*
- World Bank Group. (2023, November 14). *Interactive data access*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>.